

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DAN
KOMITE PENYELARASAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(KPTIK)
TENTANG
KOMPETISI JURNALIS KEBANGSAAN MAHASISWA

Nomor : HK.02.00/10/2024

Nomor : [REDACTED]

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (3-6-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. [REDACTED] : selaku Plt. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, dan Hubungan Masyarakat, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : KP.10.00/714/2024 tanggal 1 Maret 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. [REDACTED] : selaku Ketua Komite berdasarkan akta tanggal 25 Februari 2016, dalam hal ini bertindak untuk [REDACTED]

dan atas nama Komite Penyelarasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (KPTIK), berkedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani Gedung Perkantoran Pulo Mas 1 gedung 5 lt 1 no 10, RT.3/RW.13, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran, penyusunan peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum, pembinaan dan manajemen hubungan masyarakat, fasilitasi dan administrasi kerjasama antarlembaga, dan persidangan;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga organisasi yang merupakan wadah formal perhimpunan dari berbagai asosiasi/ organisasi nasional dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang dalam salah satu kontribusinya adalah membantu pemerintah dalam menyelaraskan pendidikan dan standarisasi industri teknologi informasi dan komunikasi serta kewirausahaan dengan dukungan digitalisasi.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengatur kerja sama serta meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk:
 - a. mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan kesepahaman sesuai fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. meningkatkan peran aktif **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi masing-masing dalam rangka Sinergisitas Pencegahan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi berbagai bidang sebagai mana berikut:

- a. sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme;
- b. kerjasama akselerasi pemberdayaan berbasis layanan digital;
- c. dukungan pelaksanaan Warung NKRI digital dan kegiatan kompetisi jurnalis kebangsaan mahasiswa; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Sosialisasi Terkait Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana terorisme di lingkungan **PIHAK KEDUA** termasuk atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* serta *hybrid*.

Bagian Kedua

Kerjasama Akselerasi Pemberdayaan Berbasis Layanan Digital

Pasal 4

- (1) Program pencegahan tindak pidana terorisme **PIHAK PERTAMA** dapat dibantu oleh **PIHAK KEDUA** melalui kerjasama dalam program akselerasi pemberdayaan berbasis layanan digital.
- (2) Kegiatan program akselerasi pemberdayaan berbasis layanan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan baik secara *online* maupun *offline* serta *hybrid*.
- (3) Bentuk kegiatan antara lain Warung NKRI Digital serta program kegiatan Jurnalis Kebangsaan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Dukungan Pelaksanaan Warung NKRI Digital dan Kegiatan
Kompetisi Jurnalis Kebangsaan Mahasiswa.

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** melaksanakan teknis dan operasional berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan kegiatan dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan evaluasi.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menghadiri setiap kegiatan dan memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan Warung NKRI Digital dan kegiatan kompetisi Jurnalis Kebangsaan mahasiswa.
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan operasional dan memberikan laporan kegiatan dalam pelaksanaan Warung NKRI Digital dan kegiatan kompetisi jurnalis kebangsaan mahasiswa.

BAB III
KERAHASIAAN

Pasal 6

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang telah dipublikasikan.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada

pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

BAB IV

JANGKA WAKTU DAN ADENDUM

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan kalender sebelum rencana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan perubahan dan/atau penambahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur secara tertulis dalam perubahan (amandemen) dan/atau penambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan sebagai bahan

masuk untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan penyusunan perjanjian kerja sama;

- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Sekretariat Utama

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Alamat :

Email :

Telepon :

PIHAK KEDUA

Sekretariat KPTIK

Alamat :

Email :

Telepon :

- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan alamat korespondensi wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

BAB VIII

PENYESELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

